

# Evaluasi Formatif sebagai evaluasi dialogis<sup>1</sup>

Jimmy Ph. Paat<sup>2</sup>

## Pengantar

Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan salah satu persoalan pendidikan yang menjadi perhatian banyak orang – tidak hanya mereka yang bergerak di dunia persekolahan, seperti guru, kepala sekolah ahli pendidikan, politisi di lembaga perwakilan rakyat yang berurusan dengan pendidikan tetapi juga mereka yang sangat jauh dari urusan persekolahan yaitu polisi<sup>3</sup> – adalah Ujian Nasional (UN). Bukankah dilangsungkan seminar hari ini sebagai pengejawantahan perhatian terhadap UN ?

UN telah begitu mengambil banyak perhatian orang. Dengan kata lain kita telah begitu disibukkan dengan UN. Khususnya saat UN akan, sedang dan setelah berlangsung. Guru sibuk membuat program yang isinya hanya membantu anak menjawab soal. Orang tua yang anak-anaknya akan mengikuti UN sibuk mencari guru les untuk membantu anak-anaknya dapat menjawab soal tes dengan cepat dan tepat. Dan yang tidak kurang menarik, kita semua sudah mengetahui hal ini, tidak sedikit para siswi-a yang akan mengikuti UN sibuk mencari “bocoran”.

Para jurnalis baik dari media cetak maupun elektronik tidak ketinggalan ikut serta terlibat berada dalam urusan UN, khususnya di saat UN akan, sedang dan setelah berlangsung. Layar kaca televisi dan halaman depan media cetak berisi laporan-laporan tentang UN. Keterlibatan para jurnaslis ini pun mengantar kita melihat pertarungan antara mereka yang mempertahankan UN, yaitu mereka khususnya yang membuat kebijakan UN (pemerintah alias kemendikbudnas), dan mereka yang anti UN, dapat disebut dari

---

<sup>1</sup> Sebagai bahan yang disampaikan di seminar Nasional SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL: Refleksi Kebijakan UN Dalam Pembentukan Karakter Bangsa, Sabtu, 12 Mei 2012, jam 9.00 sampai selesai di Gedung Auditorium Universitas Negeri Medan.

<sup>2</sup> Pengajar di Jurusan Bahasa Prancis UNJ; Anggota Koalisi Pendidikan dan Penggiat pendidikan di Sekolah Tanpa Batas (STB).

<sup>3</sup> Polisi seperti kita amati selalu sibuk menjaga kertas-kertas Ujian Nasional.

kelompok ahli pendidikan kritis yang antu UN, seperti Winarno Soerakhmad, H.A.R. Tilaar, Conny Semiawan, Soedijarto (secara kebetulan mereka adalah Guru Besar Pedagogik Emiritus LPTK yang beralamat di Rawamangun, Jakarta), dan dari Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di ranah pendidikan, seperti Koalisi Pendidikan<sup>4</sup>.

Singkatnya UN suka tidak suka melahirkan persoalan. Persoalan ini sesungguhnya telah dimunculkan dipermukaan oleh mereka yang menentang, paling tidak sejak tahun 2005. Pada tahun tersebutlah salah satu kelompok penentang UN yang bernama Koalisi Pendidikan bersama para pedagog Rawamangun yang disebut di atas **penentangan** terhadap pelaksanaan UN muncul dipermukaan. Tetapi seperti kita ketahui hingga sekarang kelompok penentang UN belum berhenti aksinya karena UN masih dijalankan.

Saya pribadi saat diminta membahas UN sejak tahun 2006 selalu bertanya apakah masih perlu membahas UN secara teoritis sekalipun<sup>5</sup>. Apakah sudah sebaiknya kita berhenti berdiskusi dan melakukan aksi ? Pertanyaan yang belum terjawab dengan tuntas oleh saya. Dengan kata lain saya pun masih mencoba mendiskusikannya, paling tidak sekarang di seminar yang digagas dan dijalankan para mahasiswa calon guru matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam yang sedang belajar di Universitas Negeri Medan.

Saya sebagai penentang UN, saya merupakan salah satu pendukung dan pendiri Koalisi Pendidikan, ketika mendiskusikan UN tidak jarang dianggap pertama, sebagai pendidik yang tidak menerima evaluasi di dalam kegiatan belajar-mengajar. Kedua, selalu diminta apa yang harus dilakukan kalau tidak ada UN. Berangkat dari dua hal tersebut saya membagi pembahasan diskusi ini menjadi tiga bagian. Pertama, saya akan membahas secara singkat beberapa paradigma evaluasi. Melalui kategori paradigma evaluasi, saya mencoba meletakkan UN dalam kerangk paradigma evaluasi. Kedua, saya akan mengurai secara singkat juga hubungan test dan standardisasi. Ketiga, pilihan paradigma evaluasi

---

<sup>4</sup> Koalisi Pendidikan adalah Kumpulan LSM, seperti ICW, Sekolah Tanpa Batas, dan organisasi Guru, seperti Federasi Serikat Guru Indonesail, Federasi Musyawarah Guru Jakarta, dan organisasi orang tua murid seperti Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan.

<sup>5</sup> Pertanyaan apakah masih perlu berdiskusi mengenai UN muncul di benak saya setelah membaca buku H.A.R. Tilaar yang diterbitkan tahun 2006. Lihat H.A.R. Tilaar, *Standardisasi Pendidikan Nasional. Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006. Karya Guru besar Emiritus Pedagogik UNJ ini telah mendiskusikan secara kritis teoritis apa yang disebut Standardisasi Pendidikan. Ini menarik karena pelaksanaan UN adalah salah satu bagian dari standardisasi pendidikan. Dengan kata lain Tilaar melihat Un dari sudut yang lebih luas.

yang tepat untuk siswa yang bertujuan belajar di sekolah sebagai tawaran. Dan terakhir uraian singkat mengenai tes dari sudut pedagogik kritis

### **Berbagai Paradigma Evaluasi**

Sepanjang yang saya amati, pembahasan UN berada dalam kerangka pembahasan evaluasi. Tetapi hampir dapat dikatakan jarang sekali para pembahas tersebut meletakkan atau mencari pijakan filosofis UN. Seolah-olah UN hanya dilahirkan dari satu akar filsafat. Padahal seperti yang dikemukakan para ahli evaluasi, paradigma evaluasi tidak tunggal<sup>6</sup>. Dengan kata lain, “cantelan” filosofis atau paradigma UN menjadi penting diketahui kita sebagai pendidik dan calon pendidik. Agar kita tidak salah arah dalam penggunaannya, dan juga dalam penganalisannya. Kelangkaan pembahasan paradigma evaluasi di kampus-kampus pendidikan guru yang mempersiapkan calon guru, dalam hal ini, diperkirakan menjadi penyebab jaranganya penganalisaan evaluasi dari sudut paradigma.

Berangkat dari pengkategorian paradigma evaluasi Jean-Marie de Ketele<sup>7</sup>, khususnya dengan memperhatikan UN yang dibuat dengan (harus) memenuhi atau bertumpu pada kriteria validitas dan realibilitas, UN berada dalam apa yang disebut *le paradigme docimologie*<sup>8</sup>. Yang kemudian *docimologie* mengarah ke *édumétrie* atau *une science de la mesure dans le champ des sciences de l'éducation*, yang dalam wacana ilmu pendidikan kita disebut psikometri. Dengan kata lain, kita mengatakan UN ini berada dalam paham positivisme, paham yang mengagungkan segalanya harus diangkakan.

Pandangan positivisme dalam pendidikan telah menjadi kritikan. Karena pandangan ini, dunia pendidikan hanya memperhatikan dunia yang diobjektifkan, artinya mengikuti

---

<sup>6</sup> Lihat Jean-Marie De Ketele, “Contrôle, examens, et évaluation”, in Jacky Beillerot & Nicole Mosconi, *Traité des pratiques de l'éducation*, Paris, Dunod, 2006, hal. 407-419.

<sup>7</sup> Jean-Marie De Ketele, “L'évaluation conjuguee en paradigme”, *Revue française de pédagogie*, 1993, 103, hal. 59-80. Di antaranya *le paradigme docimologie* (model psikometrik), *le paradigme sociologique* (paradigma sosiologis), *le paradigme de l'évaluation centrée sur les objectifs* (paradigma evaluasi à la Tyler dan Bloom); *le paradigme de l'évaluation formative d'un enseignement différencié* (paradigma evaluasi formative); *le paradigme économique* (paradigma ekonomis).

<sup>8</sup> Konsep *docimologie* dipakai dalam wacana kependidikan Prancis yang di dalam wacana kependidikan Indonesia dapat dimaknai Ilmu yang berkaitan dengan ujian (*sciences des examens*). Di kurikulum LPTK apa yang dibahas di dalam kuliah Evaluasi adalah yang dibahas juga di dalam *docimologie*.

Tilaar, kita para pendidikan digiring untuk melepaskan dunia dari penghayatan subjektif. Langkah-langkah, prosedur yang dipakai evaluasi yang bertumpu pada positivisme telah menjauhkan pengevaluasian yang memperhatikan prosedur yang lebih intuitif dan subjektif. Padahal, seperti yang dikemukakan Jacques Weiss, prosedur yang lebih menekankan pada subyektif dan intuitif atau disebut juga langkah-langkah hermeneutik, lebih ampuh digunakan para guru di dalam menilai siswi-anya.<sup>9</sup>

UN dipahami juga sebagai alat pendukung untuk menjalankan pendidikan yang akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikontrol, dan efisien. Dalam pengertian ini, kita mengatakan UN berada dalam paradigma ekonomis. Dalam pengertian ini juga kita mengatakan UN adalah alat yang mendukung pendidikan yang mengkultuskan efisiensi, untuk mengikuti apa yang dikemukakan Tilaar<sup>10</sup>. Pendidikan dengan demikian diperlakukan seperti industri. Padahal, tetap menurut Tilaar, dunia pendidikan tidak sama dengan dunia industri.

### **Tes dan standardisasi**

Memperhatikan pernyataan-pernyataan para pengambil keputusan pendidikan khususnya yang berkaitan dengan UN, kita dapat mengatakan UN dilaksanakan untuk menaikkan standar pendidikan. Sejak dimulai UN (dimulai dengan nama Ujian Akhir Nasional, yaitu tahun 2003), jadi telah berlangsung hampir satu dekade, kita dapat mengatakan ada semacam gerakan pendidikan yang beranggapan, berasumsi tes yang berpatokan tinggi sangat penting untuk memperbaiki pendidikan. Ini nampak sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat yang mengagung-agungkan pentingnya standardisasi dan karena itu pentingnya penggunaan tes-tes yang berpatokan

---

<sup>9</sup> Jacques Weiss, "La subjectivité blanche." In J.-M. De Ketele, (éd.), *Évaluation: approche descriptive ou prescriptive*, Bruxelles-Paris, De Boeck, dikutip dari De Ketele, "Contrôle...", *op cit.*, hal. 416.

<sup>10</sup> Tilaar, *Standardisasi Pendidikan nasional*, *op cit.*, hal. 67.

tinggi.<sup>11</sup> Searah dengan pengutamaan standarisasi di Amerika Serikat tidak saja meletakkan pentingnya tes objektif tetapi telah mengagung-agungkan tes, karena itu di negara tersebut, seperti yang dikemukakan Tilaar, muncul penyakit baru dalam pendidikan, yaitu keranjingan terhadap tes objektif<sup>12</sup>.

Pertanyaannya dari mana atau bila pengangungan tes ini muncul. Melalui Tilaar, kita memperoleh jejak pengangungan tes atau hadirnya budaya tes<sup>13</sup>. Tepatnya tetap menurut Tilaar, kita melihat pengangungan test ini berkaitan dengan standarisasi.<sup>14</sup> Dan standarisasi berhubungan dengan dunia industri<sup>15</sup>. Dan dunia industri bisa berjalan dengan baik jika hadir sepenuhnya efisiensi. Berangkat atau berdasarkan prinsip efisiensi ini keuntungan sebesar-besarnya diperoleh industri, seperti yang dikemukakan bapak manajemen moderen, Frederic Winslow Taylor.<sup>16</sup>

Untuk menjalankan prinsip efisiensi di antaranya harus ada kontrol yang ketat. Penggunaan tes adalah salah satu kontrol yang ampuh. Prinsip dagang ini diaplikasikan ke dunia pendidikan atau lebih tepat disebut di dunia persekolahan. Dengan kata lain sekolah harus menjalankan prinsip efisiensi. Bahkan sudah tidak sekedar menjalankan tetapi para pelaksana kegiatan di sekolah telah mengagungkan efisinsi. Pengangungan atau pengultusan efisiensi<sup>17</sup> terjadi karena pendidikan telah dilihat sebagai investasi modal<sup>18</sup>. Dan agar modal tidak sekedar modal tetapi harus diolah agar menjadi “membanyak” maka pendidikan harus dikelola secara efsisien. Dengan kata lain dengan hadirnya pengultusan,

---

<sup>11</sup> Mindy L. Kornhaber dan Gary Orfield “High-Stajes testing Policies. Examining Their Assumptions and Consequences”, in Gary Orfield dan Mindy L. Kornhaber (eds.), *Raising Standard or Raising barriers ?* New York, The Century Foundation Book, 2001, hal. 1-18.

<sup>12</sup> Tilaar, *op cit.*, hal. 131.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 95-101.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 35-45.

<sup>16</sup> Lihat Tilaar, *Ibid.* hal. 66. ,

<sup>17</sup> Istilah pengagungan efisiensi ini diambil dari Tilaar yang mengacu pada Raymond Callahan, *Education and the Cult of Efficiency*, Chicago, The University of Chicago, 1962, hal 67.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 66.

pengagungan efisiensi di dunia persekolahan, berarti sekolah tidak bisa tidak harus telah seperti perusahaan dagang. Padahal seperti dikemukakan di atas, dunia industri sangat jauh berbeda dengan dunia pendidikan (baca dunia persekolahan).

Sekalipun sekolah jauh berbeda dengan industri kecenderungan pengolahan sekolah seperti industri sudah berlangsung. Pelaksanaan UN adalah konsekuensi buruk dari masuknya prinsip industri tersebut.

### **Paradigma evaluasi atau asesmen formatif**

Pertanyaan yang selalu ditujukan dari penggagas UN kepada mereka yang anti UN dapat diformulasikan sebagai berikut “Apa yang anda, pengeritik UN, dapat tawarkan?” Jawaban saya dengan cepat mengatakan silakan membaca buku Tilaar yang menjadi acuan paparan saya ini. Jawaban lain adalah yang akan segera saya kemukakan berkaitan dengan apa yang disebut di dalam literatur evaluasi, “evaluasi formatif”<sup>19</sup> atau “asesmen formatif”<sup>20</sup>. Kedua konsep tersebut saya gunakan secara bergantian. Evaluasi formatif biasanya dilawankan dengan evaluasi sumatif (*évaluation sommative* atau *summative assessment*).

Pertanyaan yang muncul kaitannya dengan evaluasi adalah, mengikuti Perrenoud, apakah evaluasi dilakukan untuk menyeleksi siswi-a atau membantu pembelajaran siswi-a.<sup>21</sup>

Apa itu asesment formatif ? Kegiatan belajar di kelas selalu bertujuan. Dan guru bersama siswi-anya melakukan semacam kontrak kaitannya dengan tujuan. Untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui apakah tujuan telah dicapai, guru melakukan

---

<sup>19</sup> Pengindonesian dari *évaluation formative*, konsep yang dipakai di dalam literatur ilmu-ilmu pendidikan (berbahasa) Prancis. Lihat misalnya, Phillipe Perrenoud, *L'évaluation des élèves. De la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages. Entre deux logiques*, Bruxelles, De Boeck Université, 1998; Jacques Weiss (sous la direction de), *L'évaluation: problème de communication*, Fribourg, Edition Delval, 1991; Jean-Marie De Ketele, “Contrôle, examens, et évaluation”, *op cit.*

<sup>20</sup> Pengindonesian dari *formative assessment* konsep yang dipakai dalam literatur ilmu-ilmu pendidikan (berbahasa) Inggris atau Amerika.

<sup>21</sup> Phillipe Perrenoud, *op cit.*, hal, 8-14.

apa yang disebut evaluasi atau asesmen. Jika evaluasi merupakan bagian dari proses mengajar dan belajar, inilah yang disebut evaluasi untuk belajar (*assessment for learning*).<sup>22</sup> Jika yang dilakukan guru adalah memeriksa atau menyimpulkan apa yang telah dipelajari di akhir tahap belajar, dan berfungsi memberi semacam sertifikat atau diploma, proses ini disebut evaluasi sumatif (*summative assessment*). Yang terakhir ini disebut juga asesmen mengenai belajar (*assessment of learning*). Kebanyakan prosedur evaluasi yang dipakai di sekolah dan **DIHARUSKAN** pembuat kebijakan pendidikan berkaitan dengan evaluasi sumatif, seperti tes, ujian.

Guru yang menggunakan evaluasi formatif dalam kegiatan belajar-mengajar, seperti yang dikemukakan De Ketele,<sup>23</sup> melihat “kekeliruan” (*“les erreurs”*) yang dilakukan siswi-a di dalam pembelajaran bukan sebagai pengejawantahan sesuatu yang patologis, tetapi sebagai suatu proses pembelajaran yang normal. Pelaksanaan evaluasi formatif mengacu pada Allal dkk<sup>24</sup>, secara khusus bertahap tiga:

- Pertama, pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemajuan dan kesulitan pembelajaran yang dihadapi siswi-a ;
- Kedua, Penginterpretasian informasi-informasi tersebut dengan mengacu pada kriteria yang telah dibuat dan jika mungkin mendiagnos faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswi-a ;
- Ketiga, penyesuaian aktifitas pengajaran dan pembelajaran berdasarkan interpretasi informasi yang telah dikumpulkan.

Apa unsur-unsur penting yang perlu dipahami dan dijalankan guru yang akabn melakukan evaluasi formatif ? Tidak sedikit para penganjur evaluasi formatif yang mendeskripsikan faktor-faktor kunci dalam meningkatkan belajar siswi-a di sekolah. Weeden dkk mengurai 10 faktor untuk memperbaiki belajar melalui asesmen. Di antaranya adalah

---

<sup>22</sup> Paul Weeden, Jan Winter dan Patricia Broadfoot, *Assessment. What's ini it for schools ?* London & New York, Routledge, 2002, hal. 13.

<sup>23</sup> De Ketele, *Contrôle... , op cit.*, hal. 411.

<sup>24</sup> Allal L., cardinet, J., Perrenoud, P., *Évaluation formative dans un enseignement différencié*, Berne, Peter Lang, 1979, dikutip dari De Ketele, “*Contrôle.... , Ibid.*”, hal. 411.

- guru dan siswi-a bersama-sama menentukan tujuan belajar
- bertujuan menolong siswi-a untuk mengetahui dan mengenali patokan (standard) yang mereka rumuskan bersama
- melakukan umpan balik kepada siswi-a agar mereka mengenal tahap berikut dan mengetahui bagaimana melaksanakannya
- melibatkan siswi-a untuk melakukan penilaian diri sendiri (*self-assessment*)
- guru dan siswi-a bersama-sama meninjau kembali and merefleksikan data asesmen

Yang menarik diurai lebih jauh adalah yang berkaitan dengan mengajak siswi-a untuk melakukan asesment diri (*self- assessment*). Proses evaluasi diri menolong siswi-a beropikir mengenai belajar mereka and memahaminya lebih baik. Melalui penilaian diri kaitannya dengan belajar ini mengantar siswi-a dapat memahami tumjuan utam belajar mereka sdendiri dengan demikian mereka dapat memahami apa yang meraka butuhkan untuk mencapai tujuan belajar mereka.<sup>25</sup>

### **Test dari sudut perspektif pedagogik kritis**

Pembahasan test dari sudut perspektif pedagogik belum banyak dikemukakan, khususnya di dalam komunitas sarjana pendidikan Indonesia. Tilaar mencoba menyentuh pengkajian standardisasi pendidikan (dan ini berarti dengan sendirinya menyentuh juga tes) dari perspektif pedagogik kritis.<sup>26</sup> Saya mencoba mengikuti atau masuk ke pintu yang telah dibuka Guru Besar Emiritus Pedagogik UNJ yang sebentar telah memasuki usianya yang ke 80.

Di dalam diskur pendidikan bahasa kritis atau linguistik aplikasi kritis, Elena Shohamy, yang merupakan pelopor penggagas testing bahasa kritis (*critical language testing*),<sup>27</sup> menjadi acuan uraian saya ini. Melalui pembahasan tes bahasa dari sudut

---

<sup>25</sup> Weeden dkk, *Op cit.*, hal. 72.

<sup>26</sup> Lihat Tilaar, *Op cit.*, hal. 129-130.

<sup>27</sup> Lihat, Elena Shohamy, "The social responsibility of the language tester", in Robert L. Cooper, Elena Shohamy, Joel Walters, (eds.), *New Perspectives and issues in Education language Policy*. Amsterdam, John Benyamins Publishing

pedagogik kritis diharapkan pemahaman tes menjadi lebih luas daripada yang biasanya dipegang khususnya oleh guru dan calon guru

Jika saya berdiskusi mengenai test dengan baik para mahasiswi-a, calon guru maupun guru hampir dapat saya katakan mereka berpandangan test bahasa adalah instrumen yang netral. Membaca apa yang telah dikaji Shohamy sejak hampir dua dekade belakangan ini kita sampai pada pada pengertian bahwa tes bahasa adalah seperangkat mekanisme yang digunakan secara halus untuk memaksakan kebijakan bahasa dan dengan demikian untuk mengekalkan agenda-agenda ideologis.<sup>28</sup> Shohamy juga menunjukkan bahwa testing membawa pesan pentingnya suatu bahasa tertentu dengan kata lain menunjukkan hirarki bahasa. Shohamy memberi contoh kaitannya bahasa Arab bagi Arab Israel dibanding bahasa Ibrani.

“Tes bahasa tidak netral”, ujar Shohamy<sup>29</sup>. Melalui tes (bahasa) guru menjadi agen pengontrol. Dengan demikian guru mebnjadi penanggungjawab pengimplementasian kebijakan tes tanpa kekuasaan atau otoritas untuk melawan. Dalam pengertian ini guru hanya menjadi pelaksana. Atau dalam bahasa pedagogik kritis, guru dipisahkan dari konseptor (*conception*) dan hanya menjadi pelaksana, alias tukang (*excecution*). Dengan kata lain terjadi apa yang disebut *deskilling*<sup>30</sup>.

Tes bahasa kritis, tetap melalui Shohamy, bahwa tes bahasa sering dikemukakan dengan cara yang tidak demokratis dan tidak etis karena tes membawa agenda-agenda kebijakan dari mereka yang berkuasa. Dengan bantuan Bourdieu (1991), Shohamy menunjukkan bahwa tes adalah alat, instrumen untuk menjaga, mengabadikan

---

Company, 2001, hal. 113- 131; Elena Shohamy, “Assessment in multicultural societies : Applying democratic principles and practices to languages testing”, in Bonny Norton & kellen Toohey, *Critical Pedagogies and Language Learning*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, hal. 72-92; Elena Shohamy, “The Power of Test Over Teachers: The Power of Teacher Over Test”, in Diane J. Tedick, *Second language Teacher Education. International Perspectives*, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2005, hal. 101-111; Elena Shohamy, *Language Policy. Hiddens agendas and new approaches*, London & New York, Routledge, 2006, khususnya, bab 6, “Language tests”, hal. 93-109.

<sup>28</sup> Elena Shohamy, *Language Policy*, Ibid., hal, 93.

<sup>29</sup> Elena Shohamy, “The Power of Test Over Teachers.... Op cit., hal. 101.

<sup>30</sup> Lihat Michael W. Apple, *Official Knowledge. Democratic Education in as Concervative Age*, New York & London, Routledge, 2000, edisi kedua, hal. 116-136.

pengetahuan kaum dominan. Dan hasil tes diberkahi nilai-nilai ekonomi sehingga dengan demikian tes menjadi alat untuk mengontrol pengetahuan kelompok-kelompok khusus<sup>31</sup>. Ini terlihat jelas pada tes bahasa Inggris di tanah air. Dalam pengertian ini tes sering digunakan sebagai alat ideologis ketika mereka yang berada dalam kekuasaan, yang memiliki otoritas menyatakan bahwa tes berguna untuk menaikkan, memperbaiki hasil belajar. Yang terakhir ini tampak dilakukan mereka yang dengan kuat mempertahankan UN.

Lalu apa kesimpulan yang bisa diambil dari uraian saya. Seperti yang selalu saya kemukakan, yaitu TOLAK UN, dan mulailah mengajak para guru menjalankan evaluasi yang jauh lebih manusiawi, yang jauh lebih memperhatikan siswi-a yang pada dasarnya datang ke sekolah untuk belajar karena mereka butuh belajar dan BUKAN KARENA TERPAKSA ATAU DIPAKSA untuk belajar melalui UJIAN YANG MEMAKSA.

Terimakasih bagi peserta diskusi yang telah bersedia mendengar uraian saya yang singkat ini.

Jiphp, Cibubur, 10 Mei 2012

---

<sup>31</sup> Shohamy, "Assessment in multicultural societies ...." *Op cit.*, hal. 73.